

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692011/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
- Sebesar : Rp. 13.870.671.000 (TIGA BELAS MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Jumlah Uang

Rp. 13.870.671.000
Rp. 13.870.671.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 13.870.671.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 13.870.671.000

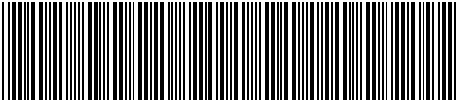
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2026
I A. INFORMASI KINERJA



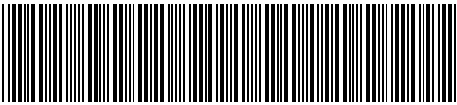
DS:6300-0379-6062-6072

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				13.870.671.000	
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum				13.870.671.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6,00	Layanan, Perkara	12.927.167.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Layanan Kerja Sama		1.00	Layanan	201.052.000
		02	EBA.959	Layanan Protokoler		1.00	Layanan	54.261.000
		03	EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	85.873.000
		04	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	12.572.552.000
		05	EBA.Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1.00	Layanan	6.109.000
		06	EBA.Z07	Layanan BMN		1.00	Layanan	7.320.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		35,00	Unit, m2, Paket	726.200.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal		35.00	Unit	726.200.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		144,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	92.771.000
Rincian Output	:	01	EBC.Z10	Layanan Manajemen SDM		144.00	Orang	92.771.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		7,00	Layanan, Rekomendasi	124.533.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		1.00	Layanan	64.908.000
		02	EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2.00	Rekomendasi	6.391.000
		03	EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan		1.00	Layanan	9.410.000
		04	EBD.Z32	Layanan Reformasi Kinerja		1.00	Layanan	21.790.000
		05	EBD.Z34	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1.00	Layanan	5.580.000
		06	EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		1.00	Layanan	16.454.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2026
I A. INFORMASI KINERJA



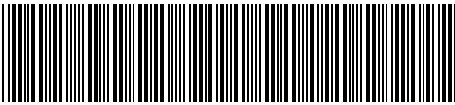
DS:6300-0379-6062-6072

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan, Rekomendasi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2026
I B. SUMBER DANA



DS:6300-0379-6062-6072

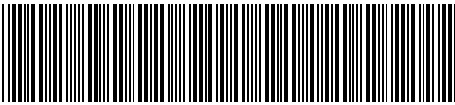
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	13.870.671.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	13.870.671.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



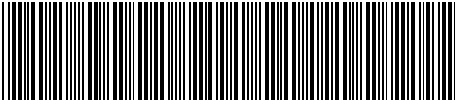
DS:6300-0379-6062-6072

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692011	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	9.810.202	3.334.269	726.200	-	-	13.870.671	08 . 55	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	9.810.202	3.334.269	726.200	-	-	13.870.671		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	9.810.202	3.334.269	726.200	-	-	13.870.671		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	9.810.202	3.116.965	-	-	-	12.927.167		
01	RM	9.810.202	3.116.965	-	-	-	12.927.167		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	-	726.200	-	-	726.200		
01	RM	-	-	726.200	-	-	726.200		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	92.771	-	-	-	92.771		
01	RM	-	92.771	-	-	-	92.771		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	124.533	-	-	-	124.533		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6300-0379-6062-6072

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

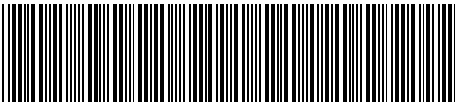
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	124.533	-	-	-	124.533	010	
JUMLAH		9.810.202	3.334.269	726.200	-	-	13.870.671		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6300-0379-6062-6072

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

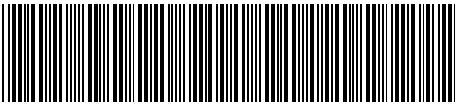
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692011	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.058.655	1.057.169	1.056.431	1.253.952	1.250.101	1.248.405	1.257.081	1.156.671	1.257.421	1.156.738	1.057.690	1.060.358	13.870.671
		BELANJA PEGAWAI	719.708	719.708	719.708	917.877	912.468	907.969	917.877	818.793	917.877	818.793	719.708	719.716	9.810.202
		BELANJA BARANG	278.431	276.945	276.207	275.559	277.117	279.920	278.688	277.363	279.028	277.429	277.465	280.118	3.334.269
		BELANJA MODAL	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.524	726.200
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.058.655	1.057.169	1.056.431	1.253.952	1.250.101	1.248.405	1.257.081	1.156.671	1.257.421	1.156.738	1.057.690	1.060.358	13.870.671
		51 BELANJA PEGAWAI	719.708	719.708	719.708	917.877	912.468	907.969	917.877	818.793	917.877	818.793	719.708	719.716	9.810.202
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	278.431	276.945	276.207	275.559	277.117	279.920	278.688	277.363	279.028	277.429	277.465	280.118	3.334.269
		53 BELANJA MODAL	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.516	60.524	726.200

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2026
IV A. B L O K I R



DS:6300-0379-6062-6072

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692011] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

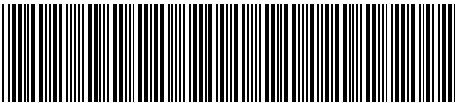
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6300-0379-6062-6072

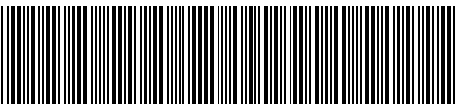
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692011] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692051/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 03
Tanggal : 13 Februari 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
- 4. Kode/Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
- Sebesar : Rp. 2.104.343.000 (DUA MILIAR SERATUS EMPAT JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.104.343.000
Rp. 2.104.343.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.104.343.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 2.104.343.000

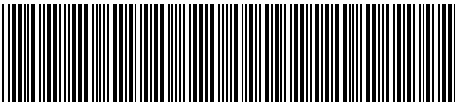
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2130-8373-2474-6091

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							2.104.343.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah							2.104.343.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya				4,00	layanan	1.261.117.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				4,00	layanan	1.261.117.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga				1,00	Perkara	1.920.000
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah				1,00	Perkara	1.920.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				7,00	Lembaga	801.066.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah				7,00	Lembaga	801.066.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	40.240.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah				1,00	Laporan	40.240.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2026
I B. SUMBER DANA



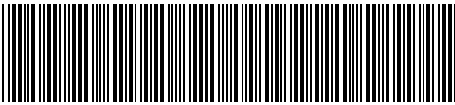
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.104.343.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



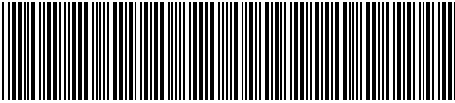
DS:2130-8373-2474-6091

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692051	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	-	2.104.343	-	-	-	2.104.343	08 . 55	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.104.343	-	-	-	2.104.343		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.104.343	-	-	-	2.104.343		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	1.261.117	-	-	-	1.261.117		
04	PNBP	-	1.261.117	-	-	-	1.261.117		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	1.920	-	-	-	1.920		
04	PNBP	-	1.920	-	-	-	1.920		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	801.066	-	-	-	801.066		
04	PNBP	-	801.066	-	-	-	801.066		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	40.240	-	-	-	40.240	08 . 55	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2130-8373-2474-6091

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

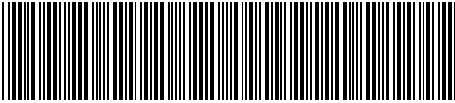
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	40.240	-	-	-	40.240	010@	
JUMLAH		-	2.104.343	-	-	-	2.104.343		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2130-8373-2474-6091

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

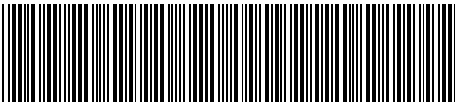
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692051	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	124.784	107.059	257.609	338.176	205.655	221.262	87.436	113.211	425.234	187.917	36.000	2.104.343
		BELANJA BARANG	0	124.784	107.059	257.609	338.176	205.655	221.262	87.436	113.211	425.234	187.917	36.000	2.104.343
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	124.784	107.059	257.609	338.176	205.655	221.262	87.436	113.211	425.234	187.917	36.000	2.104.343
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	124.784	107.059	257.609	338.176	205.655	221.262	87.436	113.211	425.234	187.917	36.000	2.104.343
		</													

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2026
IV A. B L O K I R



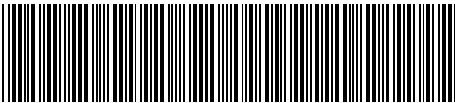
DS:2130-8373-2474-6091

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692051] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692051	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 814.192	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 814.192	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.575
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.731		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68.397
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.800		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.776
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(PNBP)	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.160		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 946
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.840	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.266
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.976	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 182.800
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 267.842	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2026
IV A. B L O K I R



DS:2130-8373-2474-6091

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692051] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

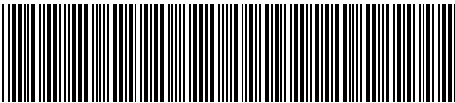
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.FAE	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 960 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 81.184 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.056 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.799 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.084 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2026
IV B. C A T A T A N



DS:2130-8373-2474-6091

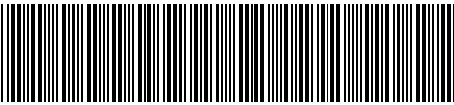
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692051] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693133/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
- 3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
- 4. Kode/Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
- Sebesar : Rp. 68.598.000 (ENAM PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.12.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.12.WA. Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 68.598.000
Rp. 68.598.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 68.598.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 68.598.000

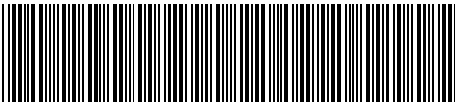
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6400-4785-0328-3490

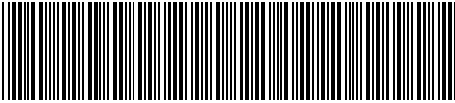
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen						68.598.000	
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah						68.598.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				2,00	Rekomendasi Kebijakan	61.588.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah				2.00	Rekomendasi Kebijakan	61.588.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi				100,00	orang	7.010.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum				100.00	orang	7.010.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2026
I B. SUMBER DANA



DS:6400-4785-0328-3490

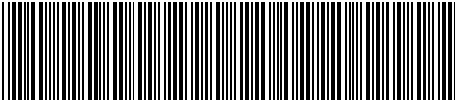
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	68.598.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	68.598.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6400-4785-0328-3490

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

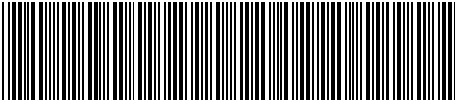
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693133	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	-	68.598	-	-	-	68.598	08 . 55	
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	68.598	-	-	-	68.598		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	68.598	-	-	-	68.598		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	61.588	-	-	-	61.588		
01	RM	-	61.588	-	-	-	61.588	010	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	7.010	-	-	-	7.010	08 . 55	
01	RM	-	7.010	-	-	-	7.010	010	
JUMLAH		-	68.598	-	-	-	68.598		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6400-4785-0328-3490

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

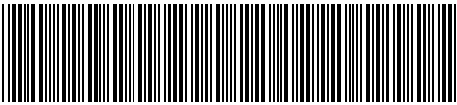
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693133	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	6.959	6.959	12.552	14.763	16.515	7.345	1.753	1.753	0	0	68.598
		BELANJA BARANG	0	0	6.959	6.959	12.552	14.763	16.515	7.345	1.753	1.753	0	0	68.598
		Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	0	6.959	6.959	12.552	14.763	16.515	7.345	1.753	1.753	0	0	68.598
135.12.WA.7143		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	6.959	6.959	12.552	14.763	16.515	7.345	1.753	1.753	0	0	68.598

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2026
IV A. B L O K I R



DS:6400-4785-0328-3490

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693133] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

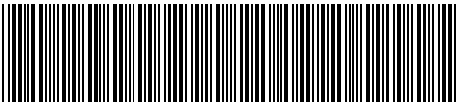
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6400-4785-0328-3490

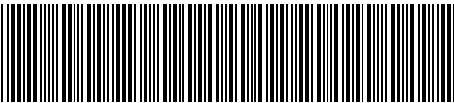
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693133] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693099/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 03
Tanggal : 13 Februari 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
- Sebesar : Rp. 1.146.454.000 (SATU MILIAR SERATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.146.454.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 1.146.454.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

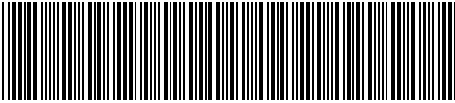
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2026

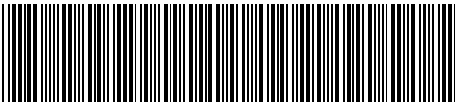


DS:3047-8446-5915-9509

Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	23.454.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	23.454.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.123.000.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	1.123.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2026
I A. INFORMASI KINERJA



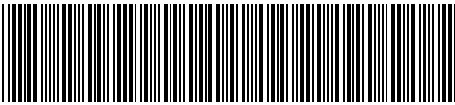
DS:3047-8446-5915-9509

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi				23.454.000	
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah				23.454.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1,00	Rekomendasi Kebijakan	23.454.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		1.00	Rekomendasi Kebijakan	23.454.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				1.123.000.000	
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				1.123.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		10,00	Lembaga	20.950.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		10.00	Lembaga	20.950.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		300,00	Orang	28.979.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah		300.00	Orang	28.979.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		16,00	Lembaga	39.257.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		16.00	Lembaga	39.257.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		16,00	dokumen, Peta, Data	20.983.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		16.00	Data	20.983.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3047-8446-5915-9509

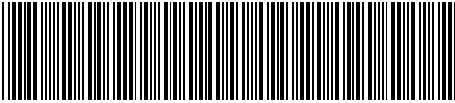
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		128,00	Orang	819.200.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	128.00	Orang	819.200.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		16,00	Kelompok Masyarakat	136.576.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	16.00	Kelompok Masyarakat	136.576.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	57.055.000
Rincian Output		:	01	QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (PN)	1.00	Lembaga	57.055.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2026
I B. SUMBER DANA



DS:3047-8446-5915-9509

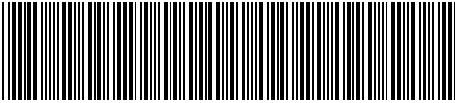
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.146.454.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	1.146.454.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



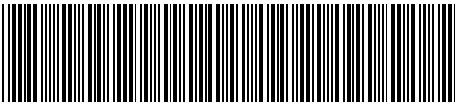
DS:3047-8446-5915-9509

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693099	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	-	1.146.454	-	-	-	1.146.454	08 . 55	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	23.454	-	-	-	23.454		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	23.454	-	-	-	23.454		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	23.454	-	-	-	23.454		
01	RM	-	23.454	-	-	-	23.454		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.123.000	-	-	-	1.123.000		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	1.123.000	-	-	-	1.123.000		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	20.950	-	-	-	20.950		
01	RM	-	20.950	-	-	-	20.950		
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	28.979	-	-	-	28.979		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

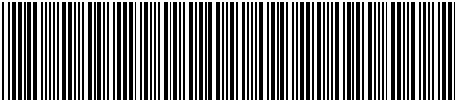


DS:3047-8446-5915-9509

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	28.979	-	-	-	28.979	010	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	39.257	-	-	-	39.257	08 . 55	
01 RM		-	39.257	-	-	-	39.257	010	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	20.983	-	-	-	20.983	08 . 55	
01 RM		-	20.983	-	-	-	20.983	010	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	819.200	-	-	-	819.200	08 . 55	
01 RM		-	819.200	-	-	-	819.200	010	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	136.576	-	-	-	136.576	08 . 55	
01 RM		-	136.576	-	-	-	136.576	010	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3047-8446-5915-9509

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

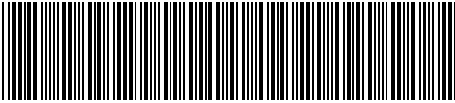
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	57.055	-	-	-	57.055	08 . 55	
	01 RM	-	57.055	-	-	-	57.055	010	
JUMLAH		-	1.146.454	-	-	-	1.146.454		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3047-8446-5915-9509

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

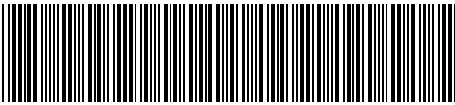
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693099	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	22.000	150.000	127.901	196.685	109.202	106.035	112.338	180.142	106.579	31.440	4.130	1.146.454
	135.11.BB.7133	BELANJA BARANG	0	22.000	150.000	127.901	196.685	109.202	106.035	112.338	180.142	106.579	31.440	4.130	1.146.454
		Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	2.000	2.000	1.962	2.962	4.152	1.962	2.962	1.962	1.962	1.531	0	23.454
	135.11.BF.7136	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	2.000	2.000	1.962	2.962	4.152	1.962	2.962	1.962	1.962	1.531	0	23.454
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		0	20.000	148.000	125.940	193.723	105.051	104.073	109.377	178.181	104.617	29.909	4.130	1.123.000	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	20.000	148.000	125.940	193.723	105.051	104.073	109.377	178.181	104.617	29.909	4.130	1.123.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2026
IV A. B L O K I R



DS:3047-8446-5915-9509

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693099] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

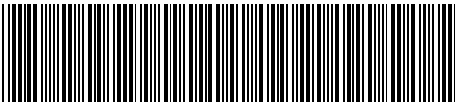
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2026
IV B. C A T A T A N



DS:3047-8446-5915-9509

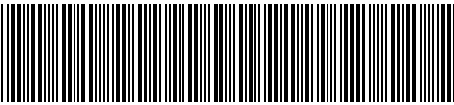
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693099] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.692998/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 02
Tanggal : 23 Januari 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
- Sebesar : Rp. 2.263.394.000 (DUA MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.05.BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.263.394.000
Rp. 2.263.394.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.263.394.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 2.263.394.000

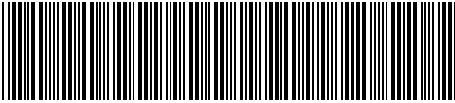
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6067-0100-4768-7303

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

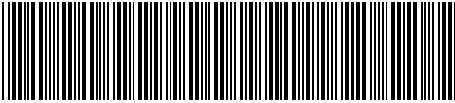
Halaman : I A. 1

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.263.394.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.263.394.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani			
	:	2. 01	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di Wilayah terhadap Standar Pelayanan			
	:	3. 01	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7121.AEF Sosialisasi dan Diseminasi	300,00	orang	132.577.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01 Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual	300.00	orang	132.577.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7121.BAH Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	1.797.637.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	1.673.691.000
	:	02	BAH.002 Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	123.946.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7121.BMA Data dan Informasi Publik	2,00	dokumen, Peta, Data	333.180.000
Rincian Output	:	01	BMA.001 Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah	2.00	Data	333.180.000

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2026
I B. SUMBER DANA



DS:6067-0100-4768-7303

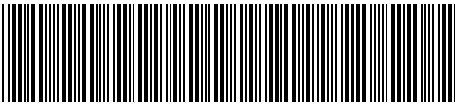
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.263.394.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6067-0100-4768-7303

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

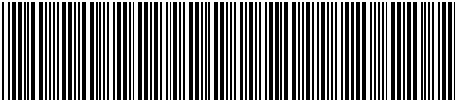
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692998	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	-	2.263.394	-	-	-	2.263.394	08 . 55	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.263.394	-	-	-	2.263.394		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.263.394	-	-	-	2.263.394		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	132.577	-	-	-	132.577		
04	PNBP	-	132.577	-	-	-	132.577		
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	1.797.637	-	-	-	1.797.637		
04	PNBP	-	1.797.637	-	-	-	1.797.637		
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	333.180	-	-	-	333.180		
04	PNBP	-	333.180	-	-	-	333.180	010@	
JUMLAH		-	2.263.394	-	-	-	2.263.394		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6067-0100-4768-7303

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

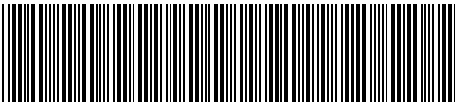
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692998	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	145.253	76.773	0	0	0	0	0	0	0	0	2.041.369	2.263.394
		BELANJA BARANG	0	145.253	76.773	0	0	0	0	0	0	0	0	2.041.369	2.263.394
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	145.253	76.773	0	0	0	0	0	0	0	0	2.041.369	2.263.394
135.05.BF.7121		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	145.253	76.773	0	0	0	0	0	0	0	0	2.041.369	2.263.394

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2026
IV A. B L O K I R



DS:6067-0100-4768-7303

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692998] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

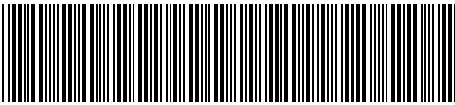
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692998	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.427
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 801.000		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 801.000	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 320.874
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.997	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.300
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 128.292
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.380	7121.BMA	Data dan Informasi Publik
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 219.660
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.270		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.400		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6067-0100-4768-7303

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692998] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-135.03.2.693031/2026

A. Dasar Hukum :

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga

: (135)

KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi

: (03)

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Provinsi

: (08)

SUMATERA BARAT
4. Kode>Nama Satker

: (693031)

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
- Sebesar

:Rp.

266.400.000,00

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03

PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	266.400.000,00
135.03.BB.7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.	266.400.000,00

C. Sumber Dana Berasal Dari:

1. Rupiah Murni

Rp.

266.400.000,00
2. PNBP

Rp.

0,00
- PNBP TA Berjalan

Rp.

0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0,00
- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0,00
- Hibah Luar Negeri

Rp.

0,00
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0,00
- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

0,00
- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0,00
5. Hibah Langsung

Rp.

0,00
- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp.

0,00
- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp.

0,00
6. SBSN PBS

Rp.

0,00

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN Padang

(010)

Rp.

266.400.000,00

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-135.03.2.693031/2026
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode / Nama Satker : (693031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman IA.1

Jakarta, 1 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-135.03.2.693031/2026
I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga: (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (693031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	266.400.000,00	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
1. Rupiah Murni	Rp.	266.400.000,00			(2) RPLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
2. PNBP	Rp.	0,00		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00			(2) RHLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0,00		
5. Hibah Langsung	Rp.	0,00		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0,00		
6. SBSN PBS	Rp.	0,00		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0,00		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0,00		

2. Rincian Pinjaman/Hibah : (dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2026
 NOMOR : DIPA-135.03.2.693031/2026
 II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara / Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
 Kode / Nama Satker : (693031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
 Kewenangan : (KD) KANTOR DAERAH

Halaman II.1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
693031	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	-	266.400,00	-	-	-	266.400,00	08.55	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	266.400,00	-	-	-	266.400,00		
7129	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	266.400,00	-	-	-	266.400,00		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	239.779,00	-	-	-	239.779,00		
01	RM	-	239.779,00	-	-	-	239.779,00	010	RM
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	24.431,00	-	-	-	24.431,00	08.55	
01	RM	-	24.431,00	-	-	-	24.431,00	010	RM
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	2.190,00	-	-	-	2.190,00	08.55	
01	RM	-	2.190,00	-	-	-	2.190,00	010	RM
	JUMLAH	-	266.400,00	-	-	-	266.400,00		

Jakarta, 1 Desember 2025
 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
 ,
 ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
 NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-135.03.2.693031/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian	:(135)	KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi	:(03)	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi	:(08)	SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker	:(693031)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : III.1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

Jakarta, 1 Desember 2025

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-135.03.2.693031/2026
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode / Nama Satker : [693031] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 1 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-135.03.2.693031/2026
IV B. C A T A T A N

Kementerian Negara / Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode / Nama Satker : [693031] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 1 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001